BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Objek Penelitian

4.1.1.1 Gambaran Umum Kelurahan Dago

Dago, dagoan berasal dari bahasa sunda yang artinya "menunggu", pada zaman dahulu pada masa penjajahan Belanda, penduduk di daerah utara Bandung memiliki kebiasaan untuk saling menunggu untuk pergi bersama-sama ke kota, yang mana pada masa itu, rute yang ditempuh menuju kota melewati daerah yang masih tergolong sepi dan rawan binatang buas, terutama di daerah hutan di sekitar terminal Dago sekarang. Pada tahun 1900-1914, pemerintah Hindia Belanda memulai pembangunan di daerah Bandung, pembangunan di daerah Dago, dimulai dengan pembangunan rumah peristirahatan milik Andre van der brun pada tahun 1905, pada saat ini bangunan ini masih berdiri dan berada bersebelahan dengan Hotel Jayakarta. Wilayah Dago itu sendiri meliputi, simpang Dago ke arah utara,dago barat , dago jati (STKS-sekarang), dago biru, dago pojok, hingga PLTA Bengkok.

Terdapat beberapa bangunan bersejarah di sepanjang Jl. Ir. H. Juanda atau biasa disebut dengan dago, diantaranya : 1. Rumah peristirahatan Andre van der Brun 2. Dago Tea house, Selain itu terdapat kompleks bangunan yang dahulu berfungsi sebagai sanatorium. Dahulu dikelola oleh Netherlands Rode

Kruis, kemudian dipindahtangan pengelolaan dan kepemilikannya oleh Palang Merah Indonesia, saat ini berada tepat di seberang Jayakarta Hotel. Kompleks ini cukup luas membentang dari utara (sekarang di sebelah atas pompa bensin), hingga ke selatan di seberang atas kampus STKS. Kompleks ini terdiri dari 12 bangunan, dua kompleks bangunan merupakan milik Universitas Padjajaran, selebihnya merupakan milik PMI. Pada tahun 1964 kompleks tersebut kemudian dijadikan sebagai perumahan karyawan Palang Merah (saat ini masih ditempat sebagian).

Bangunan di kompleks tersebut diberi nama kota-kota di Jawa Barat, seperti Banjarnegara, Sukanagara, Lebaksiuh, Subang, Panumbangan, Buah Dua. Dahulu berjejer pohon cemara di sepanjang pagar halaman kompleks tersebut, juga pohon beringin, pohon asem, pohon nangka, bahkah pohon durian sekalipun. Sekarang ada beberapa bangunan yang sudah rata dengan tanah, terbengkalai.

Kompleks bangunan tersebut memiliki nilai historis terutama dari arsitektural bangunan dimana salah satu bangunan bergaya Gothic dengan atap menjulang meruncing ke atas (rumah Sukanagara, sekarang sudah rata dengan tanah). Bangunan tersebut pada masanya hanya terdapat beberapa buah saja, termasuk yang terdapat di jalan Dago (sekarang menjadi factory outlet, dibongkar habis.)

Kelurahan Dago Kecamatan Coblong merupakan salah satu bangian wilayah. Kota Bandung dengan memiliki luas lahan sebesar 285 Ha. Secara administratif Keluarahan Dago dibatasi oleh :

- Bagian Utara : Kabupaten Bandung
- Bagian Seltan : Kelurahan Lebag Siliwangi
- Bagian Timur : Kelurahan Sekeloa dan Kel.Cigadung Cibeunying Kaler
- Bagian Barat : Sungai Cikapundung, Kelurahan Cumbuleuit Kec. Cicadap

Dan dengan pembagian penggunan areal tanahnya sebagai berikut :

NO	Penggunanan	Luas (Ha)
1	Tanah Sawah	18 ha
2	Tanah Kering (Daratan)	228, 94 ha
3	Tanah Basah	-
4	Fasiltas Umum	11,06 ha

Secara geografis Kelurhan Dago Kecamatan Coblong memiliki bentuk wilayah datar/berontak sebesar 80% dari total keseluruhan luas wilayah. Ditinjau dari sudut ketinggian tanah, Kelurahan Dago berada pada ketinggian 100 m diatas permukaan air laut. Suhu maksimum dan minimum di Kelurhan Dago berkisar 36ºC, sedangkan dilihat dari segi hujan berkisar dari 21 mm/th dan jumlah curah hujan yang terbanyak sebesar 45 hari.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kelurahan Dago dibagi RT serta RW sebagai berikut :

Tabel 4.1
Jumlah RT/ RW

NO	Jumlah RW	Jumlah RT
1	RW. 01	9
2	RW. 02	6
3	RW. 03	9
4	RW. 04	7
5	RW. 05	10
6	RW. 06	10
7	RW. 07	6
8	RW. 08	7
9	RW. 09	8
10	RW. 10	7
11	RW.11	8
12	RW.12	11
13	RW. 13	7
	Jumlah 13 RW	105

4.1.1.2 Visi dan Misi

Visi **: “** Kelurahan Dago BERMARTABAT “

Kelurahan Dago BERMARTABAT dalam hal ini Kelurahan Dago hanya melaksanakan upaya-upaya untuk selalu mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memperdayakan lembaga serta seluruh komponen masyarakat guna membangun Kelurahan Dago sebagai Kelurahan berprestasi untuk menunjang Kota Bandung yang bermartabat dalam rangka mendorong

semakin mantapnya penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kota Bandung.

MISI: 1. Menggali Potensi MasyarakaTMendorong masyarakat kea rah yamg lebih maju.

2. Membagikan ekonomi yang produktif.

3. Memfasilitasi masyarakat miskin untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan memadai.

4. Menumbuhkan potensi pendidikan, ekonomi, lingkungan hidup dan seni budaya.

5. Menumbuhkan potensi pendidikan, ekonomi, lingkungan hidup dan seni budaya.

Tujuan dan Sasaran Kelurahan

Tujuan :

a. Meningkatkan pelayanan Umum dan Publik guna mendorong optimilisasi peran serta masyarakat dalam pembangunan.
b. Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pembangunan lingkungan dan pembangunan kesehatan.
c. Meningkatkan Eksistensi dan Kualitas Lembaga, Organisasi dan Masyarakat dalam Optimalisasi Pembangunan Fsik/Non Fisik.
d. Meningkatkan Lingkungan Masyarakat yang Tertib, Aman dan Tentram.

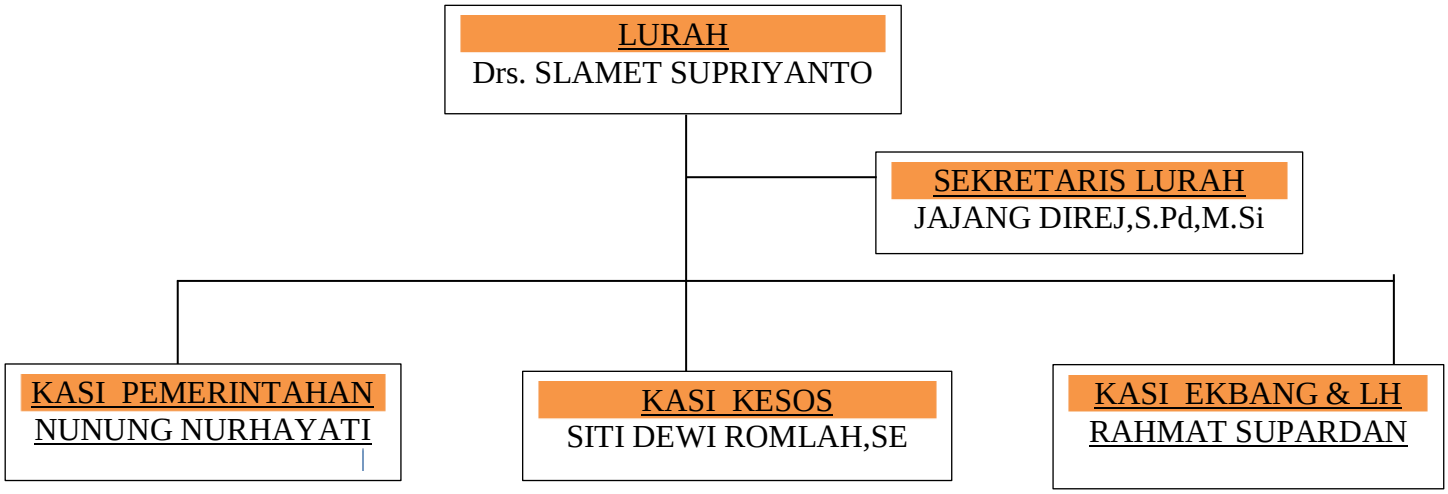
Sasaran :

a. Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur serta Meningkatnya Partisipasi Masrakat melalui Pembangunan

b. Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam menunjang Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan Derajat Kesehatan Masyakat Kelurahan.

4.1.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Kelurahan Dago Kecamatan Coblong



Sumber : kelurahan Dago

Uraian Tugas (*Job Description*)

1. **Lurah**

Istilah Lurah seringkali rancu dengan jabatan Kepala Desa. Memang, di Jawa pada umumnya, secara historis pemimpin dari sebuah desa dikenal dengan istilah Lurah. Namun dalam konteks Pemerintahan Indonesia, sebuah Kelurahan dipimpin

oleh Lurah, sedang Desa dipimpin oleh Kepala Desa. Tentu saja keduanya berbeda, karena Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung jawab kepada Camat; sedang Kepala Desa bisa dijabat oleh siapa saja yang memenuhi syarat, dan dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Lurah merupakan pimpinan dari Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Seorang Lurah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Tugas Lurah adalah melaksanakan Kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan Daerah serta melaksanakan Pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

2. SEKRETARIS LURAH

mempunyai tugas membina, mengkoodinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, keuangan, serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur dalam lingkup Kelurahan.

Fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan.
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas :

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sekretariat Kelurahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
b. Melaksanakan surat menyurat untuk kepentingan dinas.
c. Menerima, meneliti, mengagenda, dan mendistribusikan surat-surat masuk dan surat keluar.
d. Mengelola urusan rumah tangga.
e. Mengelola urusan administrasi keuangan.
f. Mengelola urusan administrasi kepegawaian.
g. Mengelola urusan administrasi perlengkapan dan peralatan.
h. Mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program/ kegiatan.
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
j. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Lurah.

3. KASI PEMERINTAHAN

Kasi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan

pengendalian kegiatan di bidang pemerintahan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Menyusun program kerja Seksi Pemerintahan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan.
c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan / petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas
d. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan lembaga kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Desa baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
e. Menyiapkan konsep keputusan, instruksi, petunjuk palaksanaan dan naskah dinas yang lain yang berkaitan dengan tugas Kepala Desa di bidang pemerintahan.
f. Mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi data bidang pemerintahan.
g. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan serta membantu tugas-tugas di bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku agar mendapatkan hasil yang optimal.

h. Membantu pelaksanaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu.
i. Membantu pelaksanaan tugas di bidang pertanahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
j. Mengumpulkan bahan untuk pembinaan serta menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat agar dapat diketahui upaya penyelesaiannya.
k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan Kartu tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, mutasi penduduk dan administrasi bidang pemerintahan yang lain.
l. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja.
m. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. KASI KESOS

Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut:

a. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;
b. Menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kebijakan dan program kerja Kelurahan;
c. Menyiapkan bahan konsep naskah dinas sesuai dengan bidang tugas atau petunjuk Lurah;
d. Melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan atau satuan kerja lainnya di dalam maupun di luar lingkungan Kelurahan tentang pelayanan jasa publik mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial;
e. Memberikan petunjuk kerja kepada bawahan serta memeriksa hasil pekerjaanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan publik yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial.

5. KASI EKBANG & LH

Tugas Pokok dan Fungsi :

1. Seksi Pembangunan dan Perekonomian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian kegiatan Pembangunan dan Perekonomian.:

   Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,

2. Seksi Pembangunan dan Perekonomian mempunyai fungsi :

a. Penginventarisasian dan pengolahan data potensi wilayah, permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan fasilitasi Pembangunan dan Perekonomian.

b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan seksi.

c. Penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan fasilitas pembangunan dan perekonomian.

d. Penyiapan bahan masukan dan pembinaan dalam rangka perencanaan dan pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana wilayah.

e. Pelaksanaan pengembangan pembangunan dan perekonomian.

f. Pengelolaan bantuan-bantuan pembangunan dari pemerintah.

g. Pelaksanaan fasilitas pembangunan perekonomian.

h. Pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai kewenangannya.

i. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja seksi.

j. Pelaksanaan fasilitas pembinaan dalam rangka meningkatkan perkoperasian dan pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masysrakat

k. Pelaksanaan penyusunan surat keterangan yang berkenaan dengan status ekonomi masyarakat dan.

l. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Lurah

4.1.2 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Kelurhan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunanan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung. Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) telah memasuki tahun ketiga. Selama itu, program ini terus memberikan perhatian pada pemerataan pembangunan hingga ke wilayah-wilayah kecil.

Prinsip "Merata, Berdaya, Bersama" selalu didengung-dengungkan dengan harapan agar program ini betul-betul bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pemberdayaan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Dalam PIPPK.

4.1.2.1 Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Dalam PIPPK

Kegiatan Pengadaan barang/jasa dalam PIPPK mengikuti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemeritah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui :

1. Swakelola

2. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pengajuan dana pengadaan barang/ jasa pada PIPPK memiliki waktu yang terbilang panjang sampai pada proses pencairan dananya. Seperti yang disampaikan oleh salahsatu aparatur kelurahan Dago, bahwasanya proses pencairan dana dari PIPPK memakan waktu sampai satu tahun setelah proposal pengajuan diterima oleh pihak PIPPK.

Teknis pengajuan barang/ jasa PIPPK harus melalui beberapa tahapan. Diantaranya; 1) masyarakat harus membuat proposal pengajuan pengadaan barang/ jasa yang akan dilakukan ditujukan kepada Bappelitbang. Alur proposal pertama kali akan diajukan kepada kelurahan yang mana nantinya akan dilanjutkan kepada pihak kecamatan dan apabila disetujui akan serahkan kepada Bappelitbang. 2) Bappelitbang nantinya akan mensurvey ke lokasi dimana dana PIPPK akan dicurahkan dalam bentuk barang/ jasa.

Proposal yang diajukan oleh pihak RW (masyarakat) setidaknya harus terdapat tujuan dari program pengadaan barang/ jasa yang diajukan, rencana anggaran biaya yang akan diperlukan, foto lokasi/ sarana prasarana yang akan dibangun atau dikembangkan. Diharapkan dengan standar pembuatan proposal pengajuan pengadaan barang/ jasa PIPPK yang seperti itu setiap proposal dapat ditindaklanjuti oleh Bappelitbang.

Pengadaan Swakelola yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah lain (type 2) Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Direncanakan dan diawasi oleh Daerah Kota Penanggung Jawab Anggaran.

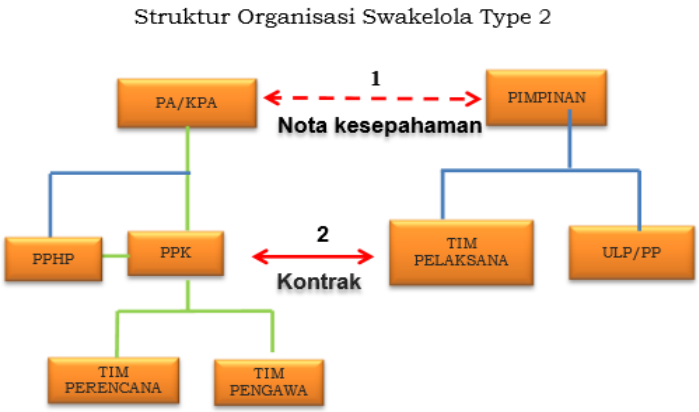
b. Pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang bukan Penanggung Jawab Anggaran.

Pengadaan melalui Swakelola oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pelaksanaan dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada Daerah Kota Penanggung Jawab Anggaran dengan pelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola, pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola
c. pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
d. pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan
e. pembayaran imbalan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan berdasarkan kontrak
f. penggunaan tenaga kerja, bahan/barang dan/atau peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian
g. kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola

h. kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola

i. pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk PPK pada Daerah Kota Penanggung Jawab Anggaran, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.



Pengadaan melalui Swakelola oleh kelompok masyarakat (Type 3) pelaksana Swakelola mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. PA/KPA bertanggungjawab terhadap penetapan kelompok masyarakat, termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran Swakelola.

b. direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana Swakelola.

c. sasaran ditentukan oleh Daerah Kota penanggung jawab anggaran.

d. pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (subkontrak).

Pengadaan secara Swakelola oleh kelompok masyarakat pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pelaksanaan Swakelola oleh kelompok masyarakat pelaksana Swakelola dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada Daerah Kota Penanggung Jawab Anggaran dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.

b. pelaksanaan pengadaan barang/jasa hanya diserahkan kepada kelompok masyarakat pelaksana Swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan.

c. pengadaan pekerjaan konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana.

d. konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh Daerah Kota Penanggung Jawab Anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. pengadaan bahan/barang, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh kelompok masyarakat pelaksana Swakelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. penyaluran dana kepada kelompok masyarakat pelaksana Swakelola dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut: 1) 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila

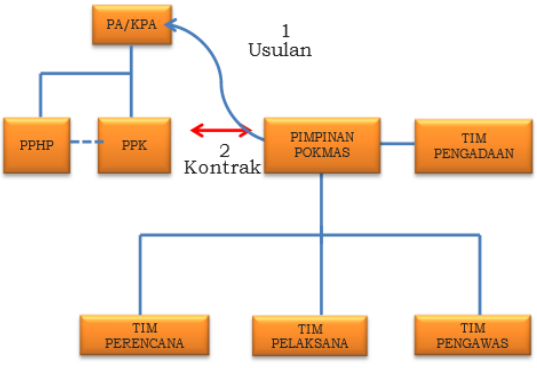
kelompok masyarakat pelaksana Swakelola telah siap melaksanakan Swakelola; 2) 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus); dan 3) 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perseratus).

g. pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana Swakelola yang dikeluarkan, dilaporkan oleh kelompok masyarakat pelaksana Swakelola secara berkala kepada PPK.

h. pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh kelompok masyarakat (tim pengawas) pelaksana Swakelola.

i. pertanggungjawaban pekerjaan/kegiatan Pengadaan disampaikan kepada Daerah Kota pemberi dana Swakelola sesuai ketentuan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Swakelola Type 3



C. Tanda Bukti Perjanjian

(1) Tanda bukti perjanjian terdiri atas:

a. bukti pembelian, untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

b. kuitansi, untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

c. Surat Perintah Kerja (SPK), dan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

d. surat perjanjian, untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

e. Surat pesanan untuk pengadaan barang/jasa melalui Epurchasing/online.

(2) Dalam hal ada hak dan kewajiban yang perlu diungkapkan (dengan bukti pembelian dan kuitansi tidak cukup) dari para pihak maka perlu dibuatkan /dilengkapi dengan SPK dan kelengkapan lainnya yang disesuaikan dengan aturan lainnya.

(3) Untuk kepentingan pertanggungjawaban keuangan,setiap tagihan dari surat perjanjian, SPK dan surat pesanan diperlukan adanya bukti kuitansi dan kelengkapan lainnya yang disesuaikan dengan aturan lainnya.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Hasil Jawaban Mengenai Partisipasi Masyarakat (X) dalam PIPPK di Kelurahan Dago

Tanggapan responden mengenai partisipasi masyarakat terdiri dari tiga indikator dengan 11 item pernyataan yang sudah teruji validitas dan reliabilitasnya. Berikut disajikan tanggapan responden pada setiap indikatornya masing-masing berdasarkan variabel partisipasi masyarakat.

4.2.1.1 Kesempatan partisipasi masyarakat dalam PIPPK di Kelurahan Dago

Kesempatan merupakan salah satu bagian penting dari pengaruhnya partisiapasi masyarakat untuk seseorang secara sadar ke dalam interaksi social dalam situasi tertentu. Dengan pengertian ini, seseorang berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dengan kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggung jawab bersama.

Untuk mengetahui pengaruh dari indikator kesempatan yang diwakili oleh penyataan-pernyataan yang dibagi-bagi sesuai dengan alat ukur variabel partisipasi sebagaimana yang tertera di dalam angket dengan total pernyataan 4 maka diketahui jawaban yang telah di isi oleh para responden adalah sebagai beriku

Tabel 4.4
Hasil Jawaban Partisipasi Masyarakat dalam PIPPK di Kelurahan Dago Mengenai Kesempatan

No	Butir Kuesioner		Skor *(Likert Scale)*					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase (%)
			5	4	3	2	1			
1	PIPPK berpengaruh pada proses politik di daerah	F	0	4	18	18	2	108	210	51,43%
		%	0,0	9,5	42,9	42,9	4,8			
2	Masyarakat memiliki Kesempatan memperoleh informasi PIPPK di kelurahan	F	1	7	15	19	0	116	210	55,24%
		%	2,4	16,7	35,7	45,2	0,0			
3	Tingkat partisipasi sumber daya manusia dalames program PIPPK	F	0	5	13	24	0	107	210	50,95%
		%	0,0	11,9	31,0	57,1	0,0			
4	Lurah dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada guna memecahkan masalah sedang dihadapi	F	2	6	19	13	2	119	210	56,67%
		%	4,8	14,3	45,2	31,0	4,8			
Total Akumulasi								**450**	**840**	**53,57%**

Sumber: Diolah oleh peneliti 2018

Tabel 4.4 di atas merupakan jawaban responden pada indikator kesempatan yang di ukur menggunakan 4 item pernyataan. Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai persentase yang didapat sebesar 53,57%. Nilai tersebut jika mengacu pada kriteria Pengklasifikasian Presentase tergolong cukup baik karena berada pada interval 52.01% – 68.00%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesempatan masyarakat dalam berpartisipasi tergolong dalam kategori cukup baik.

Tanggapan pada butir pernyataan nomor empat memiliki persentase tertinggi (56,67%)

Artinya bahwa Masyarakat Kelurahan Dago memiliki tingkat kepercayaan Kepemimpinan Lurah di kelurahan Dago bahawa dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada guna memecahkan masalah yang sedang dihadapi, Pada persentase kedua (55,24%) yaitu jawaban responden mengenai Masyarakat memiliki Kesempatan memperoleh informasi PIPPK di Kelurahan Dago cukup baik masih belum semuanya masayarakat memahami adanya PIIPPK tersebut, Pada persentase ketiga (50,95%) yaitu jawaban responden mengenai Tingkat partisipasi sumber daya manusia dalam program PIPPK juga masih tergolong cukup baik , karena pemaslahan di Kelurahan tersebut tingkat partisipasi masyarakatnya semakin menurun dan masyarakatpun menjadi heterogen dan program PIPPK tersebut kurang berjalan dengan semestinya, Pada persentase keempat (51,43%) yaitu jawaban responden PIPPK berpengaruh pada proses politik di daerah masyarakat di Kelurahan Dago sebagian sangat setuju karena menurut mereka setiap program yang di keluarkan pemerintah selalu ada politik yang mempengaruhi.

4.2.1.2 Kemauan pasrtisipasi masyarakat dalam PIPPK di Kelurahan Dago

Untuk mengetahui pengaruh dari indikator kemampuan yang diwakili oleh penyataan-pernyataan yang dibagi-bagi sesuai dengan alat ukur variabel partisipasi

sebagaimana yang tertera di dalam angket dengan total pernyataan 3 maka diketahui jawaban yang telah di isi oleh para responden adalah sebagai berikut**.**

Tabel 4.5
Hasil Jawaban Partisipasi Masyarakat dalam PIPPK di Kelurahan Dago Mengenai Kemauan

No	Butir Kuesioner		Skor *(Likert Scale)*					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase (%)
			5	4	3	2	1			
1	Pelaksanaan atas program PIPPK tersebut baik	F	0	4	21	14	3	110	210	52,38%
		%	0,0	9,5	50,0	33,3	7,1			
2	Sikap partisipasi Masyarakat dalam PIPPK	F	3	5	16	18	0	119	210	56,67%
		%	7,1	11,9	38,1	42,9	0,0			
3	Kebersamaan antara penyelenggara PIPPK dengan masyarakat	F	0	7	19	15	1	116	210	55,24%
		%	0,0	16,7	45,2	35,7	2,4			
4	PIPPK dapat berjalan sendiri tanpa partisipasi dari masyarakat sekitar kelurahan Dago	F	0	5	18	17	2	110	210	52,38%
		%	0,0	11,9	42,9	40,5	4,8			
Total Akumulasi								**455**	**840**	**54,17%**

Sumber: Olah data terlampir, 2018

Tabel 4.5 di atas merupakan jawaban responden pada indikator Kemauan yang di ukur menggunakan 4 item pernyataan. Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai persentase yang didapat sebesar 54,17%. Nilai tersebut jika mengacu pada kriteria Pengklasifikasian Presentase tergolong cukup baik karena berada pada interval 52.01% – 68.00%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kemauan masyarakat dalam berpartisipasi tergolong dalam kategori cukup baik.

Tanggapan pada butir pernyataan nomor dua memiliki persentase tertinggi (56,67%) mengenai Sikap partisipasi Masyarakat dalam PIPPK bahwasanya di Kelurahan Dago cukup baik dan tidak semua masyarakat sekitar mempunyai sikap partisipasi, Pada persentase kedua (55,24%) yaitu jawaban responden mengenai Kebersamaan antara penyelenggara PIPPK dengan masyarakat Artinya bahwa Masyarakat Kelurahan Dago memiliki tingkat cukup baik atas Kebersamaan antara penyelenggara PIPPK dengan masyarakat",

Pada presentase ketiga (52,38%) tentang Pelaksanaan atas program PIPPK tersebut baik dan PIPPK dapat berjalan sendiri tanpa partisipasi dari masyarakat sekitar kelurahan Dago memiliki tingkat presentase yang sama cukup baik karena menurut masyarakat PIPPK di Kelurahan Dago pelksanaanya berjalan lancar tetapi terhambat dengan adanya partisipasi masyrakatnya yang diniali belum baik dan kaena dari itu PIPPK tidak bisa berjalan sendiri tanpa partisipasi masyarakat.

4.2.1.3 Kemampuan Partisipasi masyarakat dalam PIPPK di Kelurahan Dago

Masyarakat di Kelurahan Dago mempunyai kempampuan untuk berpartisiapasi karena kemampuan itu modal utama agar program yang kita rencanakan berjalan sesuai dengan yang di inginkan. Kemampuan adalah sifat yang dibawa lahir atau dipelajari yang memungkinkan seseorang yang dapat menyelesaikan pekerjaannya, baik secara mental ataupun fisik.. Kemampuan dan keterampilan memainkan peranan utama dalam perilaku dan kinerja individu.

Keterampilan adalah kecakapan yang berhubungan dengan tugas yang di miliki dan dipergunakan oleh seseorang pada waktu yang tepat. Untuk mengetahui pengaruh dari indikator kemampuan yang diwakili oleh penyataan-pernyataan yang dibagi-bagi sesuai dengan alat ukur variabel partisipasi sebagaimana yang tertera di dalam angket dengan total pernyataan 3 maka diketahui jawaban yang telah di isi oleh para responden adalah sebagai berikut**.**

Tabel 4.6
Hasil Jawaban Partisipasi Masyarakat dalam PIPPK di Kelurahan Dago Mengenai Kemampuan

No	Butir Kuesioner		Skor *(Likert Scale)*					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase (%)
			5	4	3	2	1			
1	Masyarakat memahami PIPPK	F	1	8	14	17	2	115	210	54,76%
		%	2,4	19,0	33,3	40,5	4,8			
2	Masyarakat memiliki kemampuan dalam melaksanakan program PIPPK	F	2,0	3,0	21,0	12,0	4,0	113	210	53,81%
		%	4,8	7,1	50,0	28,6	9,5			
3	Kemampuan masyarakat sangat baik dalam memecahkan masalah program PIPPK	F	0	4	24	13	1	115	210	54,76%
		%	0,0	9,5	57,1	31,0	2,4			
Total Akumulasi								**343**	**630**	**54,44%**

Sumber: Di olah peneliti, 2018

Tabel 4.6 di atas merupakan jawaban responden pada indikator kesempatan yang di ukur menggunakan 4 item pernyataan. Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai persentase yang didapat sebesar 54,17%. Nilai tersebut jika mengacu pada

kriteria Pengklasifikasian Presentase tergolong cukup baik karena berada pada interval 52.01% – 68.00%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesempatan masyarakat dalam berpartisipasi tergolong dalam kategori cukup baik.

Tanggapan pada butir pernyataan memiliki persentase tertinggi (54,76%) Masyarakat memahami PIPPK dan Kemampuan masyarakat sangat baik dalam memecahkan masalah program PIPPK yang artinya masyarakat sebelum sepenuhnya memahami PIPPK tersebut dan masyarakat sekitar belum cukup baik dalam memecahkan masalah program PIPPK di Kelurahan Dago.

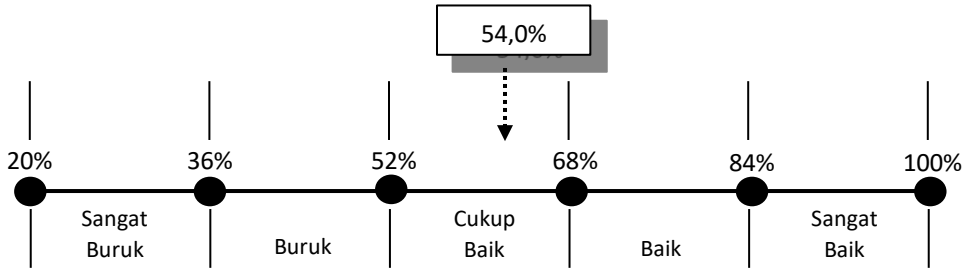
Pada Presentase kedua (53,81%) Masyarakat memiliki kemampuan dalam melaksanakan program PIPPK cukup baik karena pembangunan dan kegitan di sekitar dago cukup terlaksana .

Tabel 4.7
Rekapitulasi Tanggapan Terhadap Variabel Partisipasi Masyarakat

Variabel	**Indikator**	**Skor Aktual**	**Skor Ideal**	**Persentase (%)**	**Kategori**
Partisipasi	Kesempatan	450	840	53,6%	Cukup Baik
	Kemauan	455	840	54,2%	Cukup Baik
	Kemampuan	343	630	54,4%	Cukup Baik
Akumulasi		**1248**	**2310**	**54,0%**	**Cukup Baik**

Sumber: Olah data terlampir, 2018

Gambar 4.1
Garis Kontinum Variabel Partisipasi



Tabel 4.7 dan Gambar 4.1 di atas menunjukkan rekapitulasi tanggapan responden mengenai variabel Partisipasi. Nilai persentase yang diperoleh sebesar 54,0%. Angka tersebut berada pada interval 52% - 68% dan termasuk dalam kategori cukup baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat di kelurahan Dago tergolong cukup baik.

4.2.2 Hasil Jawaban Mengenai Efektivitas dalam PIPPK di Kelurahan Dago

Tanggapan responden mengenai partisipasi masyarakat terdiri dari empat indikator dengan 12 item pernyataan yang sudah teruji validitas dan reliabilitasnya. Berikut disajikan tanggapan responden pada setiap indikatornya masing-masing berdasarkan variabel partisipasi masyarakat.

4.2.2.1 Input Efektivitas tentang program PIPPK di Kelurahan Dago

Untuk mengetahui pengaruh dari indikator input yang diwakili oleh penyataan-pernyataan yang dibagi-bagi sesuai dengan alat ukur variabel efektivitas

sebagaimana yang tertera di dalam angket dengan total pernyataan 4 maka diketahui jawaban yang telah di isi oleh para responden adalah sebagai berikut**.**

Tabel 4.8
Hasil Jawaban Efektivitas dalam PIPPK di Kelurahan Dago Mengenai Input

No	Butir Kuesioner		Skor *(Likert Scale)*					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase (%)
			5	4	3	2	1			
P1	Sarana dan prasarana hasil PIPPK sudah terpenuhi	F	0	4	24	14	0	116	210	55,24%
		%	0,0	9,5	57,1	33,3	0,0			
P2	Rencana Kegiatan PIPPK di RW terlaksana dengan baik	F	0	1	39	2	0	125	210	59,52%
		%	0,0	2,4	92,9	4,8	0,0			
P3	Biaya program PIPPK sudah terpenuhi	F	0	5	19	18	0	113	210	53,81%
		%	0,0	11,9	45,2	42,9	0,0			
P4	Sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam efektifitasnya PIPPK	F	0	4	14	24	0	106	210	50,48%
		%	0,0	9,5	33,3	57,1	0,0			
Total Akumulasi								**460**	**840**	**54,76%**

Sumber: Dioalah oleh pemeliti 2018

Tabel 4.8 di atas merupakan jawaban responden pada indikator input yang di ukur menggunakan 4 item pernyataan. Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai persentase yang didapat sebesar 54,76%. Nilai tersebut jika mengacu pada kriteria Pengklasifikasian Presentase tergolong cukup baik karena berada pada interval

52.01% – 68.00%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa input masyarakat dalam berpartisipasi tergolong dalam kategori cukup baik.

Tanggapan butir pernyataan yang pertama fasilitas fisik (sarana dan prasana) memiliki presentase (55,24%) Fasilitas merupakan Suatu benda atau alat yang digunakan untuk mempermudah atau mendukung suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan, hasil observasi di lapanagan hasil sarana dan prasarana PIPPK sudah terpenuhi seperti dibuatnya pot bunga di sempanjang jalan dan sekitaran perumahan masyarakat di sekitar dago dan perbaikan pos2 di setiap RW di Kelurhan Dago.

Pernyataan kedua informasi memiliki presentase (59.52%) sebagai informasi yang berhubungan dengan rencana kegitan PIPPK di Kelurahan Dago tujuan penyelenggaraan rencana kegiatan agar sesuai dengan SOP yang sudah dubuat, Material inilah yang kemudian dijadikan sebagai sebuah informasi bagi pemohon.

Pernyataan ketiga memiliki presentase (53,81%) sebagai modal, Modal adalah sumberdana yang digunakan untuk membiayai segala kegiatan salah satunya kegiatan progam PIPPK. Modal dari Pemerintah berdampak pada Efektivitasnya program PIPPK itu sendiri, Modal menjadi faktor penting penunjang keberhasilan suatu kegiatan baik kegiatan pribadi maupun kegiatan yang melibatkan instansi pemerintahan sehingga modal menjadi penentu suatu rencana yang akan laksanakan.

Pernyataan keempat memilki presentase (50,48%) terkait Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan sebuah asset yang dimiliki oleh setiap manusia untuk

mewujudkan perannya sebagai mahluk sosial yang mengelola dirinya serta mengembangkan potensi diri yang dimilikinya guna mewujudkn kesejahteraan dalam kehidupan. Maka dari itu sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap efektivitasnya PIPPK di kelurahan Dago.

4.2.2.2 Proses Produksi Efektivitas program PIPPK di Kelurahan Dago

Untuk mengetahui pengaruh dari Proses Produksi yang diwakili oleh penyataan-pernyataan yang dibagi-bagi sesuai dengan alat ukur variabel efektivitas sebagaimana yang tertera di dalam angket dengan total pernyataan 4 maka diketahui jawaban yang telah di isi oleh para responden adalah sebagai berikut**.**

Tabel 4.9
Hasil Jawaban Efektivitas dalam PIPPK di Kelurahan Dago
Mengenai Proses Produksi

No	Butir Kuesioner		Skor *(Likert Scale)*					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase (%)
			5	4	3	2	1			
P1	Cara Aparatur mensosialisasikan program PIPPK mudah dipahami oleh masyarakat	F	0	5	14	23	0	108	210	51,43%
		%	0,0	11,9	33,3	54,8	0,0			
P2	Pelaksanaan kegitan PIPPK mudah dipahami oleh masyarakat	F	0	2	30	10	0	118	210	56,19%
		%	0,0	4,8	71,4	23,8	0,0			
P3	Sosialisasi PIPPK di Kelurahan Dago sangat	F	0	6	33	3	0	129	210	61,43%
		%	0,0	14,3	78,6	7,1	0,0			

	baik									
Total Akumulasi								**355**	**630**	**56,35%**

Sumber: Diolah oleh peniliti 2018

Tabel 4.8 di atas merupakan jawaban responden pada indikator proses produksi yang di ukur menggunakan 4 item pernyataan. Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai persentase yang didapat sebesar 56,35%. Nilai tersebut jika mengacu pada kriteria Pengklasifikasian Presentase tergolong cukup baik karena berada pada interval 52.01% – 68.00%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses produksi masyarakat dalam berpartisipasi tergolong dalam kategori cukup baik.

Tanggapan butir pernyataan yang pertama komunikasi memilki presentase (51,43%) Komunikasi adalah suatu kegiatan penyampaian sebuah informasi dari satu orang ke orang lain. Cara aparatur sosialisasi seharusnya dapat dengan mudah di pahami oleh masyarakat sehingga masyarakat berkeinginan untuk berpartisipasi dan dapat dengan mudah berkomunikasi dengan instansi pemerintahan yang diinginkan.

Keberhasilan dalam suatu proses dapat dilihat dari penyampaian informasi yang teat dan jelas, penyampaian informasi melalui komunikasi yang dilakukan oleh Aparatur Kelurhan Dago belum berjalan dengan efektif karena masih ada sebagian ketua RT yang belum mengetahui tentang SOP program PIPPK tersebut.hal ini disebabkan bahwa sebagian besar pelaksanaan PIPPK belum efektiv.

Pernyataan kedua memiliki presentase sebanyak (56,19%) Pengambilan keputusan merupakan suatu tindakan yang dilakukan sebagai upaya untuk mencapai rencana yang telah direncanakan. Pengambilan keputusan merupakan langkah yang

dilakukan sebagai langkah pilihan dalam memecahkan suatu permasalahan. Pengumpulan fakta dan data, agar program PIPPK mudah dipahami oleh masyarakat dan program PIPPK berjalan dengan efektiv.

Pernyataan ketiga memiliki prsentase (61,43%) Sosialisai adalah suatu proses yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga memberikan kontribusi yang efektif kepada sebuah organisasi. Sosialisasi juga diartikan sebagai sebuah proses yang dilakukan untuk mempelajari kebiasaan, nilai, norma yang terdapat dalam suatu masyarakat agar dapat diterima dilingkungannya.

Proses sosialisasi yang dilakukan oleh aparatur tentang program PIPPK yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan agar program tersebut efektiv. Ssialisasi yang dilakukan kepada ketua RT selaku penerima dana dengan cara melakukan rapat dan evaluasi tentang SOP program tersebut.

4.2.2.3 Hasil (Output) Efektivitas program PIPPK di Kelurahan Dago

Untuk mengetahui pengaruh dari output (hasil) yang diwakili oleh penyataan-pernyataan yang dibagi-bagi sesuai dengan alat ukur variabel efektivitas sebagaimana yang tertera di dalam angket dengan total pernyataan 4 maka diketahui jawaban yang telah di isi oleh para responden adalah sebagai berikut.

Tabel 4.10
Hasil Jawaban Efektivitas dalam PIPPK di Kelurahan Dago

Mengenai Hasil (Output)

No	Butir Kuesioner		Skor *(Likert Scale)*					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase (%)
			5	4	3	2	1			
P1	Hasil program PIPPK dirasakan menyerluruh oleh masyarakat di kelurahan Dago	F	0	2	40	0	0	128	210	60,95%
		%	0,0	4,8	95,2	0,0	0,0			
P2	Kemampuan Aparatur Kelurahan Dago dalam mensosialisasikan PIPPK sesuai SOP	F	0	11	28	3	0	134	210	63,81%
		%	0,0	26,2	66,7	7,1	0,0			
Total Akumulasi								**262**	**420**	**62,38%**

Sumber:Diolah oleh peneliti, 2018

Tabel 4.9 di atas merupakan jawaban responden pada indikator Hasil (Output) yang di ukur menggunakan 2 item pernyataan. Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai persentase yang didapat sebesar 62,38%. Nilai tersebut jika mengacu pada kriteria Pengklasifikasian Presentase tergolong cukup baik karena berada pada interval 52.01% – 68.00%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil (output) masyarakat tergolong dalam kategori cukup baik.

Pernyataan pertama memiliki presentase (60,95%) Hasil merupakan suatu proses akhir yang merupakan tujuan dari suatu proses dan hasilpun dapat berupa jasa maupun informasi, hasil dari program PIPPK berupa produk dan jasa yang diberikan oleh Aparatur Kelurahan Dago kepada masyarakat, karena dari observasi peneliti

masyarakat menggap hasil program PIPPK sangat bermanfaat dan menyeluruh ke masyarakat sekitar.

Pernyataan kedua memilki presentase (63,81%) Pelayanan publik memiliki tujuan untuk memberikan kepuasan kepada masyarkat, sehingga untuk mencapai kepuasan tersebut aparatur dituntut untuk melakukan pelayanan dengan maksimal dan profesional. Pelayanan jasa yang diberikan oleh aparatur di Kelurahan Dago.

tentang kemampuan aparatur mensosialisasikan program tersebut sesuai dengan SOP cukup baik karena hasil dari program PIPPK sangat dirasakan oleh masyarakat di Kelurahan Dago.

4.2.2.4 Produktivitas program PIPPK di kelurahan Dago

Produktivitas sebagai perbandingan antara luaran (output) dengan masukan (input), produktivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Produktivitas dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu industri atau UKM dalam menghasilkan barang atau jasa. Sehingga semakin tinggi perbandingannya, berarti semakin tinggi produk yang dihasilkan. Ukuran-ukuran produktivitas bisa bervariasi, tergantung pada aspek-aspek output atau input yang digunakan sebagai agregat dasar, misalnya: indeks produktivitas buruh, produktivitas biaya langsung, produktivitas biaya total, produktivitas energi, produktivitas bahan mentah,

Untuk mengetahui pengaruh dari Produktivitas yang diwakili oleh penryataan-pernyataan yang dibagi-bagi sesuai dengan alat ukur variabel efektivitas sebagaimana yang tertera di dalam angket dengan total pernyataan 4 maka diketahui jawaban yang telah di isi oleh para responden adalah sebagai berikut**.**

Tabel 4.11
Hasil Jawaban Efektivitas dalam PIPPK di Kelurahan Dago Mengenai Produktivitas

No	Butir Kuesioner		Skor *(Likert Scale)*					Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase (%)
			5	4	3	2	1			
P1	Tingkat pendidikan Aparatur sesuai dengan kemampuan yang dimiliki	F	0	4	30	8	0	122	210	58,10%
		%	0,0	9,5	71,4	19,0	0,0			
P2	Lurah Kelurhan Dago sangat memotivasi tentang PIPPK	F	0	11	29	2	0	135	210	64,29%
		%	0,0	26,2	69,0	4,8	0,0			
P3	Pendapatan/gaji yang diterima mempengaruhi produktivitas kerja aparatur	F	0	16	20	6	0	136	210	64,76%
		%	0,0	38,1	47,6	14,3	0,0			
Total Akumulasi								**393**	**630**	**62,38%**

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2018

Tabel 4.10 di atas merupakan jawaban responden pada indikator produktivitas yang di ukur menggunakan 3 item pernyataan. Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai persentase yang didapat sebesar 62,38%. Nilai tersebut jika mengacu pada kriteria Pengklasifikasian Presentase tergolong cukup baik karena berada pada

interval 52.01% – 68.00%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa produktivitas masyarakat tergolong dalam kategori cukup baik.

Tanggapan butir pernyataan yang pertama (58,10%) Pendidikan instansi pemerintahan berusaha untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan untuk aparatur. Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan sumberdaya manusia terutama mngembangkan potensi diri. Pendidikan dalam suatu lembaga merupakan usaha yang dilakukan untuk mengembangkan kearah yang diingkinkan apakah tingkat pendidikan Aparatur sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Peningkatan pendidikan harus mempu menadai aparatur yang memiliki kemampuan. Lulusan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan besar pengaruhnya terhadap produktivitas suatu organisasi. Prodiktivitas kerja individu perlu ditingkatan secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan merupakan salah satu upaya mengembangkan sumber daya manusia.

Pernyataan kedua memiliki presentase (64,29) Motivasi kerja memiliki peran penting dalam meningkatkan semangat kerja aparatur. Motivasi datang dari luar maupun dari dalam. Motivasi dari luar datang datang dari luar diri kita bisa sesama aparatur ataupun dari atasan. Sedangkan motivasi dari dalam datang dari diri sendiri. Motivasi dilakukan untuk meraih kesuksesan dan menghindari terjadinya permasalahan dalam instansi. Pengakuan dan pemberian penghargaan menjadi sebuah motivasi kerja yang besar. Karena efektivitas dapat diukur dari adanya motivasi kerja

dari Lurah. Motivasi yang diberikan oleh Lurah kepada aparatur di Kelurahan Dago agar aparatur dapat bekerja lebih semangat dan lebih giat untuk mencapai hasil yang maksimal.

Pernyataan yang ketiga memilki presentase (64,76%) Pendapatan adalah adalah suatu penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas tenaga atau fikiran yang telah dikeluarkan untuk orang lain baik dalam bentuk uang maupun fasilitas. pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh dari oeganisasi tempat kerja.

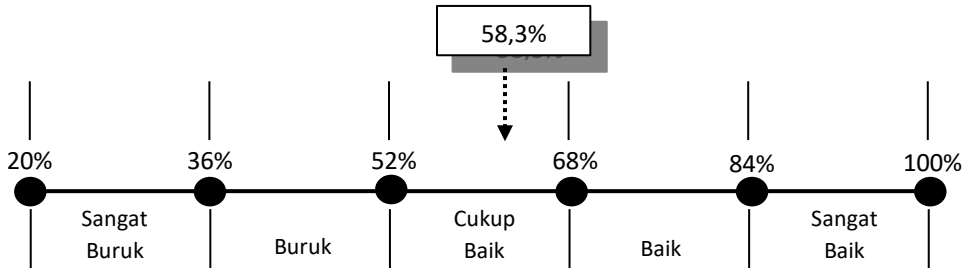
Tabel 4.12
Rekapitulasi Terhadap Variabel Efektivitas PIPPK

Variabel	**Indikator**	**Skor Aktual**	**Skor Ideal**	**Persentase (%)**	**Kategori**
Efektivitas	Input	460	840	54,8%	Cukup Baik
	Proses Produksi	355	630	56,3%	Cukup Baik
	Hasil (Output)	262	420	62,4%	Cukup Baik
	Produktivitas	393	630	62,4%	Cukup Baik
Akumulasi		**1470**	**2520**	**58,3%**	**Cukup Baik**

Sumbe Diolah oleh peneliti, 2018

Gambar 4.2

Garis Kontinum Variabel Efektivitas PIPPK



Tabel 4.11 dan Gambar 4.2 di atas menunjukkan rekapitulasi tanggapan responden mengenai variabel efektivitas. Nilai persentase yang diperoleh sebesar 58,3%. Angka tersebut berada pada interval 52% - 68% dan termasuk dalam kategori cukup baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas PIPPK di kelurahan Dago tergolong cukup baik.

4.2.3 Pengaruh antara Partisipasi Masyarakat dalam PIPPK terhadap Efektivitas PIPPK di Kelurahan Dago

4.2.3.1 Analisis Korelasi *Pearson Product Moment*

Untuk melihat bagaimana pengaruh partisipasi terhadap efektivitas, maka digunakan metode korelasi *Pearson Product Moment* karena bentuk hipotesis dalam penelitian ini adalah assosiatif (hubungan).

Berikut disajikan hasil pengaruh partisipasi terhadap efektivitas, Dengan bantuan *software* SPSS.22 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.12
Analisis Korelasi dengan *Pearson Product Moment*

Correlations

		Partisipasi	Efektivitas
Partisipasi	Pearson Correlation	1	,708**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	42	42
Efektivitas	Pearson Correlation	,708**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	42	42

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan hasil output *SPSS v.22* diatas, dapat diketahui nilai koefesien korelasi antara Materi pelatihan (X) dengan Kinerja (Y) sebesar 0,708. Nilai korelasi bertanda positif yang artinya semakin tinggi partisipasi maka efektivitas PIPPK akan meningkat. Nilai koefesien korelasi sebesar 0,708 menurut sugiono (2013:184) termasuk kepada hubungan yang kuat (interval 0,60-0,799).

4.2.3.2 Uji Hipotesis

untuk mengetahui apakah partisipasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas, maka digunakan hipotesis sebagai berikut :

$H_o : \rho 1 = 0$ Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembangunan.

$H_a : \rho 1 \neq 0$ Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembangunan.

Kriteria tolak H_0 jika thitung > t tabel

Dengan taraf signifikansi 0,05 atau 5% dengan dk = n-k-1 = 42-1-1= 40 sehingga didapat nilai t-tabel pada distribusi t sebesar 2,021.

Untuk mencari nilai t-hitung menggunakan rumus sebagai berikut.

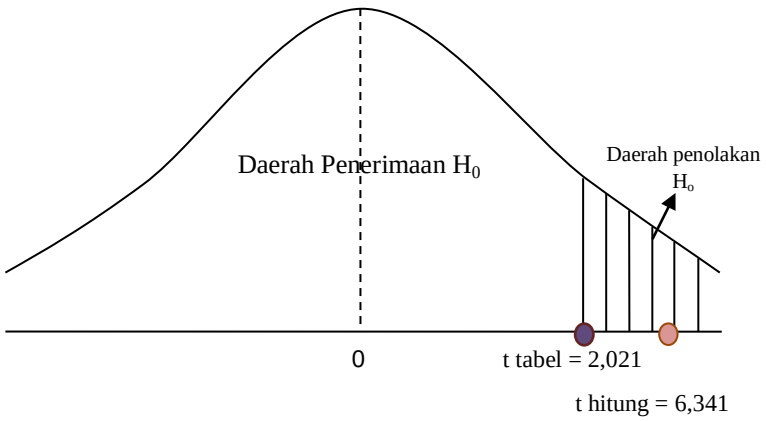
$$\mathbf{t = rs \frac{\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-rs^2}}}$$

$$t=0,708\frac{\sqrt{42-2}}{\sqrt{1-0,708^2}}$$

$$\text{t-hitung} = 6,341$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa nilai t hitung > t tabel (6,341 > 2,021) sehingga H_0 ditolak, artinya Terdapat pengaruh yang signifikan dari Materi pelatihan terhadap Kinerja . Jika disajikan dalam bentuk kurva hipotesis maka akan tampak sebagai berikut:

Grafik 4.1
Grafik Penolakan dan Penerimaan Ho Variabel Partisipasi Terhadap Efektivitas PIPPK



4.2.3.3 Koefisien Determinasi (KD)

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh partisipasi terhadap efektivitas maka dapat dihitung menggunakan koefesien determinasi (*KD)* sebagai berikut.

Kd = (r_s)^2 x 100 %

Kd = (0,708)^2 x 100 %

Kd = 50,1%

Dengan nilai koefesien determinasi sebesar 50,1%, memiliki arti bahwa partisipasi memberikan pengaruh terhadap efektivitas sebesar 50,1%, sedangkan sisanya sebesar 49,9% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti.

Hasil penelitian dari sub variabel kesempatan, kemauan, kemampuan tentunya dapat memberikan gambaran bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat cukup signifkan terhadap efektivitas PIPPK, artinya apabila partisipasi masyarakat tidak ada secara optimal maka tentunya berimplikasi terhadap ketidak efektivitasnya PIPPK di Kelurahan Dago.

Dari pemahaman di atas jika relevansikan dengan permasalahan dalam dalam penelitian ini yakni terkait dengan pengaruh partisipasi masyarakat terhadap efektivitas masyarakat, maka dalam hal ini terlihat pentingnya partisipasi masyarakat dengan efektivitas PIPPK, dalam hal ini terlihat pentingnya partisipasi masyarakat membaerikan pengaruh terhadap efektivitas PIPPK yang ada di Kelurahan Dago,